

Review

Judul Buku : **Pancasila 1 Juni dan Syariat Islam**
Penulis : Prof. Dr. Hamka Haq, MA.
Tahun : 2011
Penerbit : RM Books

KANDUNGAN NILAI-NILAI SYARIAT ISLAM DALAM PANCASILA

M. Saifullah Rohman

Peneliti pada Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB-LIPI).
Email: saifullah.rohman@gmail.com

Pendahuluan

Lahirnya Pancasila tak bisa dilepaskan dari peran Bung Karno. Sebagaimana sejarah mencatat bahwa Pancasila pertama kali lahir dari buah pikirnya. Sebagai negara baru, Indonesia saat itu membutuhkan dasar filosofis yang mampu menyatukan seluruh elemen bangsa dalam menjalankan “roda” yang bernama negara. Pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno menyampaikan pidato yang menjadi dasar Indonesia merdeka. Diawali dengan mengemukakan apa itu kemerdekaan dan sejarah bangsa-bangsa lain yang merdeka, Bung Karno menekankan pentingnya keinginan untuk merdeka dari segenap rakyat, tanpa dibumbui dengan hal-hal yang “*njlimet*” sebelum menyatakan kemerdekaan. Ketika kita terlalu “bergulat” dalam menyiapkan sesuatu yang “*njlimet*” tersebut maka akan berakibat pada ketakutan dan ketidaksiapan untuk menjadi bangsa merdeka. Padahal, satu hal yang diperlukan dalam menyiapkan kemerdekaan bangsa adalah menemukan kesamaan pandangan, ideologi, dan latar belakang sebagai sebuah bangsa Indonesia. Merdeka adalah ketetapan hati seluruh rakyat, menjadi jiwa yang merdeka tidak hanya kemerdekaan badan. Salah seorang pembicara pernah berkata, “Kita bangsa Indonesia tidak sehat badan, banyak sakit Malaria, banyak disentri, banyak *hongerudeem*, banyak ini

dan itu, 'sehatkan dulu bangsa kita', baru kemudian merdeka."¹ Soekarno pun saat itu mengemukakan argumennya bahwa jika harus menyelesaikan itu semua terlebih dahulu, 20 tahun lagi pun Indonesia tak akan merdeka. Di dalam Indonesia yang merdeka-lah kita menyehatkan rakyat kita.

Pernyataan tersebut memang benar adanya, hukum internasional pun hanya mensyaratkan pembentukan negara dengan tiga unsur dasar, yaitu rakyat, bumi, dan pemerintah. Artinya, ketiga modal dasar itu telah dimiliki oleh Indonesia saat itu untuk menjadi negara merdeka. Adapun persoalan dasar negara bisa diatur di kemudian hari. Persoalan Indonesia merdeka didirikan atas dasar apa menjadi fokus utama dalam pidato Bung Karno 1 Juni 1945. Lagi-lagi Bung Karno belajar dari sejarah-sejarah bangsa lain yang sudah merdeka dalam merumuskan dasar negaranya. Jerman di bawah kepemimpinan Nazi-Adolf Hitler, dasar negara yang dirumuskannya tidak dalam 10 hari saja, melainkan sudah dirumuskan berpuluh-puluh tahun sebelumnya. Dasar negara Indonesia pun hendaknya merupakan berasal dari dalam diri Indonesia sendiri, digali dari kedalaman filosofis murni kehidupan bermasyarakat Indonesia, bukan dari ajaran luar.

Akan tetapi, kini Pancasila menghadapi tantangan yang cukup berat. Nilai-nilai luhur Pancasila kian tergerus oleh zaman, baik dalam tata kelola pemerintahan maupun dalam kehidupan sosial kemasyarakatan sehari-hari. Padahal, Pancasila merupakan roh bangsa yang semakin dibutuhkan untuk menghadapi tantangan dan persoalan bangsa ini.² Ketegangan dan konflik kedaerahan kerap menghiasi berita di koran-koran dalam negeri. Takdir sebagai bangsa dengan pluralitas semakin luntur. Padahal sejarah telah menunjukkan bahwa pluralitas dan kebhinekaan Indonesia disatukan dan diikat oleh Pancasila sebagai dasar negara.

¹ Daras, Roso. TT. *Pidato Bung Karno 1 Juni 1945; Lahirnya Pancasila (ke-1)*. Dalam internet online: <http://rosodaras.wordpress.com/2010/05/29/pidato-bung-karno-1-juni-1945-lahirnya-pancasila-ke-1-2/>

² Kompas. 2013. *Pancasila Makin Dibutuhkan Bangsa Ini*. Surat Kabar Harian Kompas; Edisi, Minggu, 2 Juni 2013. hal. 1

Jalan Panjang Pancasila Menjadi Dasar Negara Indonesia

Penerimaan Pancasila saat itu bukanlah serta merta diterima begitu saja sebagai dasar negara, banyak perdebatan di antara berbagai kalangan sebelum akhirnya Pancasila diputuskan dan diakui sebagai dasar negara. Kalangan negarawan muslim Indonesia tidak menyetujui karena nilai-nilai syariat Islam belum terakomodasi, baik secara implisit maupun eksplisit dalam sila-silanya. Kemudian pada perkembangannya, Pancasila dianggap sebagai akar dari persoalan kekisruhan bangsa ini sehingga muncul kelompok fundamentalis dan ekstremis yang menginginkan syariat Islam menjadi dasar negara.

Ali Syahbana dalam tulisannya mengatakan bahwa ketika kita melihat sejarah, Pancasila tidak hanya dirumuskan oleh tokoh nasional saja. Ada tokoh ulama yang ikut serta dalam proses penyusunan dasar negara tersebut, seperti KH. Wahid Hasyim dari kalangan NU maupun ulama lain dari kalangan Muhammadiyah. Kehadiran para tokoh ulama tersebut tentunya mewarnai dan berdampak pada rumusan Pancasila yang Islami, yaitu Pancasila yang menampakkan *ke-rahmatan lil 'alamin* ajaran Islam, bukan Pancasila yang jauh dari dan sepi dari nilai-nilai keislaman.³

Buku ini memang bukan buku sejarah seperti yang telah diungkapkan oleh penulis karena tidak ditulis berdasarkan teori-teori sejarah. Akan tetapi, sejarah tak bisa dilepaskan begitu saja sebagai pendukung data dalam buku ini sebagaimana diakui sendiri oleh penulis. Penulis dalam buku tersebut mencoba mengupas dan menginterpretasi nilai syariat Islam yang terkandung dalam Pancasila dengan tujuan untuk menggugah kembali kesadaran masyarakat Indonesia, khususnya kalangan muslim bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila baik secara tekstual maupun kontekstual tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam. Dengan jeli, guru besar UIN Alauddin Makasar ini mengkontekstualisasikan nilai-nilai yang tersirat di dalam Pancasila dengan ajaran Islam.

Buku ini memiliki fokus kajian teologis mengenai sejauh mana Pancasila 1 Juni 1945 itu memiliki nilai religiusitas keislaman. Misalnya sila pertama Pancasila 1 Juni 1945 adalah kebangsaan, merupakan kajian untuk mengungkap

³ Syahbana, Ali. 2012. *Pancasila dan Keluwesan Ajaran Islam*. Dalam internet online: <http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,4-id,40159-lang,id-c,kolom-t,Pancasila+dan+Keluwes+Ajara+Islam-.phpx> Diakses tanggal, 22-2-2013.

sisi kebangsaan menurut syariat yang selama ini menjadi pertentangan dan perdebatan. Kebangsaan atau nasionalisme Indonesia sama sekali tidak bertentangan dengan nilai syariah, bahkan dalam arti luhur nasionalisme itu sendiri disyariatkan oleh Allah Swt. Negara ini dibangun atas dasar kesamaan kebangsaan, bukan atas kesamaan agama atau yang lainnya sehingga sila kebangsaan menjadi sila pertama pada pidato lahirnya Pancasila 1 Juni 1945 (Hlm. Xii). Demikian juga pada sila-sila lain dalam Pancasila, meskipun susunannya kemudian berubah.

Nilai Syariat Islam dalam Tiap Sila Pancasila

Menurut Prof. Hamka Haq—penulis buku, kesadaran masyarakat perlu ditumbuhkan di tengah-tengah menurunnya rasa tanggung jawab dalam mengamalkan dan menjalankan Pancasila karena perasaan khawatir bahwa Pancasila bertentangan dengan nilai syariat Islam. Pancasila merupakan pengejawantahan dari ajaran Islam. Islam adalah agama *rahmah* bagi sekalian alam, mencintai kerukunan, toleransi, keadilan, gender, dan semua sendi kehidupan dunia. Sebagai rujukan untuk mengetahui nilai-nilai syariat dalam tiap butir Pancasila yang bersumber dari pidato bung Karno 1 Juni 1945, buku ini layak untuk dibaca. Itulah nilai lebih dari buku ini di samping nilai-nilai lain, seperti titik temu antara Pancasila 1 Juni dengan syariat Islam sehingga tuduhan yang mempertentangkan antara syariat dan kebangsaan dapat terbantahkan. Indonesia didirikan dengan dasar Pancasila yang menganut asas kebangsaan, artinya dasar kesamaan sebagai bangsa Indonesia, bukan atas dasar kesamaan agama, etnis, atau budaya. Nilai-nilai syariat Islam secara implisit dan eksplisit terdapat pada masing-masing sila dalam pancasila. Melalui buku ini, penulis juga melakukan kritik nalar terhadap kelompok yang selalu mengagendakan negara dengan syariat Islam.

Tujuan dari penulisan buku ini adalah untuk menguak teka-teki dibalik perumusan Pancasila oleh Bung Karno, ia bukanlah tidak menghargai ajaran Islam, melainkan ialah yang memasukkan “spirit” Islam dalam Pancasila. Hal yang paling jelas memperlihatkan “spirit” Islam menurutnya adalah sila pertama—Ketuhanan Yang Maha Esa”.

a. Sila Pertama; Ketuhanan Yang Maha Esa

Banyak kalangan yang menghendaki agama mayoritas-Islam-menjadi dasar negara, tetapi hal itu ditentang oleh kelompok lain yang menilai bahwa ada hak-hak pemeluk agama lain yang minoritas. Sangat penting untuk mengakui bahwa ada kelompok minoritas dari kewarganegaraan sehingga tidak terjadi diskriminasi. Sila pertama ini ditetapkan sebagai alternatif dari pembentukan Islam. Sila pertama ini menjamin hak-hak pemeluk agama lain, sejauh agama itu diakui oleh negara.⁴ Membangun Indonesia merdeka bukan berdasar atas kesamaan keagamaan, tetapi berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa yang menganugerahi bangsa Indonesia dengan kemerdekaan.

Sila pertama ini memang diakui baik secara langsung maupun tidak langsung adalah cerminan dari ajaran Islam. Tuhan dalam agama Islam adalah Esa, tidak ada yang menandingi ataupun menyekutui-Nya. Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung arti bahwa meskipun Indonesia bukan negara agama, tetapi agama merupakan nilai luhur yang dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan negara. Penduduk yang beragama tentu memiliki ajaran luhur yang menjadikan pemeluknya selalu berada dalam kebaikan dan kebenaran selama mengikuti ajaran agamanya. Indonesia bukanlah negara sekuler yang tidak mengakui agama dalam pemerintahannya, dan bukan negara agama yang menjadikan agama mayoritas sebagai agama negara. Melainkan, sebagai negara berketuhanan Yang Maha Esa yang mengakui agama sebagai spirit dalam penyelenggaraan negara.

Soekarno menegaskan bahwa kemerdekaan yang dimiliki oleh Indonesia ini adalah berkah dan rahmat dari Tuhan. Maka dari itu, prinsip ketuhanan tak bisa lepas dari dasar negara Indonesia. Indonesia dengan beragam pemeluk agama hendaknya bertuhan secara berkeadaban, artinya saling menghormati satu sama lain antar pemeluk agama yang berbeda. Sebagaimana yang diungkapkan pada pidato 1 Juni 1945:

Prinsip yang kelima hendaknya; Menyusun Indonesia merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Prinsip ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa al-

⁴ Vickers, Adrian. 2011. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Insan Madani. hal.181

Masih. Yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad Saw. Orang Budha menjalankan ibadahnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya bertuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni tiada eogisme-agama. Dan hendaknya Negara Indonesia satu negara yang ber-Tuhan! Marilah kita amalkan, jalankan agama, baik Islam, maupun Kristen dengan cara berkeadaban. Apakah cara berkeadaban itu? Ialah hormat menghormati satu sama lain.⁵

Pada teks pidato yang dibacakan Soekarno di depan BPUPKI ini menempatkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila terakhir dan menempatkan sila Kebangsaan pada sila pertama. Penempatan urutan ini banyak menyimpan teka-teki bagi seluruh warga dari dulu hingga sekarang, bahkan beberapa kalangan menuduh bahwa Soekarno adalah pemikir sekuler. Bagi kalangan normatif-tekstualis, penempatan sila Ketuhanan pada urutan terakhir kurang tepat, sila Ketuhanan merupakan primakausa dari sila-sila lainnya (hal.129).

Terlepas dari itu semua, Hamka Haq-penulis secara lugas menerangkan dalam bukunya bahwa Soekarno tidak bermaksud “menyepelekan” urutan dengan menempatkan sila Ketuhanan pada sila terakhir. Bila melihat penempatan sila Ketuhanan ini dari sisi kaca mata filsafat, Bung Karno memandang bahwa Ketuhanan merupakan *final cause/ultimate cause* yang menjadikan Tuhan merupakan tujuan akhir dari pengamalan dan pengabdian manusia di dunia. Mengagungkan Tuhan tidaklah harus menempatkan atau menyebut namanya di awal kalimat. Dalam ideologi Islam, menyebut nama Tuhan, baik di awal maupun di akhir tidaklah menjadi masalah bagi-Nya, karena semua arah dan tempat adalah milik-Nya. Sebagaimana bunyi firman-Nya:

Dialah yang Awal dan yang akhir yang Zhahir dan yang Bathin; dan dia Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. al-Ha-diid [57]: 3). (Hlm.132).

Keselarasannya sila pertama Pancasila dengan syariat Islam terlihat dalam al-Qur'an yang mengajarkan kepada umatnya untuk selalu mengesakan Tuhan,

⁵ Pidato Bung Karno di depan Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai tanggal 1 Juni 1945 di Jakarta. Dalam Hamka Haq. 2011. *Pancasila 1 Juni dan Syariat Islam*. Jakarta: RM Books

seperti dalam Surat al-Baqarah, ayat 163 yang memiliki arti; “Dan Tuhan kamu itu adalah Tuhan Yang Maha Esa . Tidak ada Tuhan melainkan Dia Yang Maha Murah, lagi Maha Penyayang”.⁶ Konsep ini menunjukkan bahwa dasar kehidupan bernegara rakyat Indonesia adalah ketuhanan. Di dalam Islam, konsep ini biasa disebut *hablum min Allah* yang merupakan esensi dari tauhid berupa hubungan manusia dengan Allah Swt.⁷

b. Sila Kedua; Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila kedua dari Pancasila ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menghargai dan menghormati hak-hak yang melekat dalam diri pribadi manusia tanpa terkecuali. Jika hubungan manusia dengan Tuhannya ditunjukkan pada sila pertama, maka hubungan sesama manusia ditunjukkan pada sila kedua. Konsep *Hablum min an-nass* (hubungan sesama manusia) dalam bentuk saling menghargai sesama manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang beradab. Tidak ada perbedaan dalam hak dan kewajiban sebagai sesama manusia ciptaan Tuhan, artinya tidak boleh ada diskriminasi antar umat manusia. Berperilaku adil dalam segala hal merupakan prinsip kemanusiaan yang terdapat dalam sila kedua Pancasila, prinsip ini terlihat dalam ayat al-Qur’an surat al-Maa’idah, ayat 8 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran). Karena Allah, menjadi saksi dengan adil dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. al-Maa’idah [5]: 8).

c. Sila Ketiga: Persatuan Indonesia

Persatuan Indonesia yang merupakan bunyi sila ketiga Pancasila menunjukkan kepada dunia bahwa persatuan merupakan dasar dibentuknya negara In-

⁶ Syahbana, Ali. 2012. *Pancasila dan Keluwesan Ajaran*. Dalam internet online: <http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,4-id,40159-lang,id-c,kolom-t,Pancasila+dan+Keluwes+ajaran+Islam-.phpx> .Diakses tanggal, 22-2-2013.

⁷ Muttaqien, Sabilul. 2011. *Keselarasn Nilai-Nilai Pancasila Dengan Ajaran Islam*. Dalam internet online: <http://blog.uin-malang.ac.id/dargombes/indonesia/keselarasn-nilai-nilai-pancasila-dengan-ajaran-islam/index.html>

donesia. Persatuan Indonesia bukan dalam arti sempit saja, tetapi dalam arti luas bahwa seluruh penduduk Indonesia diikat oleh satu kesatuan geografis sebagai negara Indonesia. Adapun konsep persatuan dalam bingkai ajaran Islam meliputi *Ukhuwah Islamiyah* (persatuan sesama muslim) dan juga *Ukhuwah Insaniyah* (persatuan sebagai sesama manusia). Kedua konsep tersebut hendaknya berjalan beriringan agar tercipta masyarakat yang harmonis dan jauh dari perpecahan dan pertikaian karena perbedaan agama, suku, maupun ras. Islam selalu menganjurkan pentingnya persatuan sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an;

"Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu Karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk." (Q.S. Ali Imran [3]: 103).

"Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat." (Q.S. al-Hujurat [49]: 10).

d. Sila Keempat; Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmad Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan

Sila keempat Pancasila yang menekankan pentingnya kehidupan yang dilandasi oleh musyawarah memang selaras dengan nilai luhur dalam ajaran Islam. Sikap bijak dalam menyelesaikan suatu masalah adalah dengan bermusyawarah. Musyawarah merupakan jalan terbaik dalam mencari solusi dimana masing-masing pihak berdiri sama tinggi tanpa ada perbedaan. Hasil dari musyawarah pun merupakan kesepakatan bersama yang harus dijalankan dengan penuh keikhlasan. Konsep Islam mengenai musyawarah dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dikenal dengan nama *syuura* (musyawarah). Konsep ini tercermin dalam beberapa surat dalam al-Qur'an, salah satunya dalam Surat Ali Imron, ayat 159:

"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya." (QS. Ali Imron [3]: 159).

"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka." (QS. asy-Syuura [42]: 38).

e. Sila Kelima; Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Dalam setiap sila Pancasila ternyata mengandung nilai-nilai keislaman, sebagaimana sila kelima yang mengisyaratkan adanya keadilan dalam proses penyelenggaraan negara. Keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali oleh adanya perbedaan agama, ras, dan sebagainya. Ajaran Islam memuat berbagai konsep mengenai keadilan, baik adil terhadap diri sendiri maupun orang lain. Sebagai agama yang *rahmatan lil alamin*, misi besar Islam adalah implementasi keadilan dalam segala sendi kehidupan. Oleh sebab itu, Islam memerintahkan umat muslim untuk selalu berbuat adil dalam segala hal dan menghindari pertikaian serta permusuhan agar tatanan sosial masyarakat dapat tercipta dengan baik. Sila kelima yang menekankan pada keadilan sosial sejatinya merupakan cerminan dari konsep Islam mengenai keadilan. Mengenai keadilan dalam ajaran Islam dapat dilihat pada al-Qur'an;

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (Q.S. an-Nahl [16]: 90)

Pancasila Bukanlah Sesuatu yang Sakral

Tapi satu hal yang perlu diingat bahwa Pancasila bukanlah sesuatu yang harus disakralkan, ia adalah buatan manusia yang tak lepas dari kekurangan. Pensakralan dan penyalahafsiran yang terjadi selama ini akibat keegoan masing-masing penguasa dalam usaha untuk melanggengkan kekuasaannya di bumi pertiwi. Dalam hal ini, bukan berarti Pancasila tidak relevan dengan Indonesia sekarang sehingga harus diganti demi menata kembali negara ini. Pancasila tetap sesuatu yang kontekstual selama ia diposisikan sebagai dasar negara tanpa penafsiran yang sarat kepentingan individu. Kembali untuk selalu diingat bahwa lahirnya Pancasila adalah untuk menyatukan seluruh warga negara Indonesia yang ber-Bhineka Tunggal Ika (berbeda-beda tetapi tetap satu jua).

Penutup

Pada kesimpulan yang diambil dari buku ini, Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi negara tidaklah bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi semesta alam), Islam sangat relevan dan fleksibel dalam segala bidang kehidupan. Islam mengatur segala para pemeluknya dalam segala hal, baik itu kehidupan individu maupun sosial kemasyarakatan. Kedalaman nilai filosofis Pancasila yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai ajaran Islam hendaknya memperkuat posisi kita sebagai negara Indonesia yang beragama. Beragama yang berkeadaban dengan menghormati semua pemeluk agama yang ada, sebagaimana yang dicita-citakan oleh Bung Karno. Oleh sebab itu, kita sebagai warga negara Indonesia dan masyarakat yang beragama senantiasa melaksanakan, menjaga, dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, dan beragama.

Buku ini bukanlah buku yang sempurna dan lepas dari berbagai kesalahan, masih terdapat beberapa kekurangan yang menjadi yang perlu diperbaiki dalam cetakan selanjutnya. Ada banyak kesalahan mendasar berupa kesalahan *typo* sehingga mengganggu kenyamanan dalam membaca, di antaranya: *bertentanagan*, *mengeritik* (hal.18), *lieratur* (hal. 23), *sebahagian* (hal. 28, 30, 36, 40, 50, 75, 106, 107), *besemilah* (hal. 46), *bahagian* (hal. 51, 175, 184), *bukanlan* (hal. 70), *pemandangarn* (hal. 81), *politik* (hal. 83), *kiyai* (hal. 108), *dialamai* (hal.114), *yarat*

(hal.151), *sesame* (hal. 162), *apatah lagi* (hal. 163), *dianataramu* (hal. 188), *sepanjang* (hal. 192), *washiat* (hal. 199), *shabat* (hal. 212).

Terlepas dari beberapa kekurangan yang ada, buku ini menambah khazanah pemahaman mengenai Pancasila dalam kaitannya dengan Islam. Perdebatan yang selalu dinamis antara Pancasila dan Islam menjadikan dua hal tersebut selalu menarik untuk selalu dikaji agar tidak terjadi friksi berkepanjangan di antara penduduk Indonesia. Kesatuan yang mengikat bangsa Indonesia sebagai sebuah negara hendaknya selalu dijaga demi keutuhan bangsa. Pro dan kontra akan selalu terjadi karena Pancasila bukanlah kitab suci atau sesuatu yang sakral, ia adalah hasil rumusan manusia yang bagaimanapun juga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya selaras dengan kandungan ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Daras, Roso. TT. *Pidato Bung Karno 1 Juni 1945; Lahirnya Pancasila (ke-1)*. Dalam internet online: <http://rosodaras.wordpress.com/2010/05/29/pidato-bung-karno-1-juni-1945-lahirnya-pancasila-ke-1-2/>
- Haq, Hamka. 2011. *Pancasila 1 Juni dan Syariat Islam*. Jakarta: RM Books
- Vickers, Adrian. 2011. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Insan Madani
- Syahbana, Ali. 2012. *Pancasila dan Keluwesan Ajaran*. Dalam internet online: <http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,4-id,40159-lang,id-c,kolom-t,Pancasila+dan+Keluwes+ajaran+Islam-.phpx>. Diakses tanggal, 22-2-2013.
- Muttaqien, Sabilul. 2011. *Keselarasan Nilai-Nilai Pancasila Dengan Ajaran Islam*. Dalam internet online: <http://blog.uin-malang.ac.id/dargombes/indonesia/keselarasan-nilai-nilai-pancasila-dengan-ajaran-islam/index.html>
- Kompas. 2013. *Pancasila Makin Dibutuhkan Bangsa Ini*. Surat Kabar Harian Kompas; Edisi, Minggu, 2 Juni 2013. hal. 1